

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN  
BENGKALIS (STUDI KECAMATAN PINGGIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**EKA AULIA PUTRI**  
**NPM :167310497**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Eka Aulia Putri  
NPM : 167310497  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis  
(Studi Kecamatan Pinggir)

Format sistematika dan pemahaman materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, Januari 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing



**Ranggi Ade Febrina, M.Si**

**Andriyus, S.Sos, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama	: Eka Aulia Putri
NPM	: 167310497
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima unuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Maret 2021

Ketua	Sekretaris
 Andriyus, S.Sos., M.Si	 Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I	Anggota
 Indra Safri, S.Sos., M.Si	 Dr. Zainal, S.Sos., M.Si



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 216/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 Februari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Februari 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Eka Aulia Putri  
NPM : 167310497  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)

Nilai Ujian : Angka : " 82,7 " ; Huruf : " A "   
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 25 Februari 2021

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU DAN POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Eka Aulia Putri  
NPM : 167310497  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis  
(Studi Kecamatan Pinggir).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Maret 2021

<p>Ketua</p>  <p><b>Andriyus, S.Sos., M.Si</b></p>	<p>An. Tim Penguji Sekretaris</p>  <p><b>Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si</b></p>
<p>Wakil Dekan I</p>  <p><b>Indra Safri, S.Sos., M.Si</b></p>	<p>Turut Menyetujui</p> <p>Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan</p>  <p><b>Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si</b></p>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR :276/UJR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Eka Aulia Putri  
N P M : 167310497  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis ( Studi Kecamatan Pinggir ).**

**Struktur Tim :**

1. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji  
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal : 24 Februari 2021  
Dekan  
  
**Dr. Wahru Akmal Latif, M.Si.**

Disampaikan Kepada :  
Yth. Bapak Rektor UIR  
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
Yth. Ketua Prodi.....  
Arsip -----sk.penguji-----

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat hidayat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Srata (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis Studi Kecamatan Pinggir**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCI. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan

izin dalam surat penelitian serta surat lainnya dalam hal keperluan perkuliahan.

3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si dan Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan yang berharga demi kesempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak-bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan motivasi serta nasehat dalam perkuliahan.
7. Bapak-bapak, ibu-ibu karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Mama tercinta Erna Dan Bapak Tersayang Akuanto atas curahan kasih sayang serta motivasi tiada henti membuat penulis semangat atas menyelesaikan studi. Mama ku tercinta ERNA, banyak perjuangan yang telah mama berikan, Motivasi, fasilitas perkuliahan, serta Doa yang selalu mama berikan. Terimakasih penulis sampaikan kepada mama



tercinta atas apa yang mama berikan, tak akan eka kurangi bakti dan cintaku pada mama, dan dukungan mama selama diperkuliahan. Sehingga saat ini perkuliahan sudah selesai saat ini sedang berjuang mendapatkan Gelar sarjana. Semua ini Eka Persembahkan untuk mama dan bapak, didalam hati eka yang paling dalam mengatakan tiada kasih sayang yang abadi selain kasih sayang seorang ibu di dunia ini.

9. Kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa terimakasih penulis ucapkan pada acik aslan dan mak mai, dan ako alua dan pak opal beserta sepupu penulis Ovia Febrietri, Farhan, Triamanda, Yogi Prayoga, Alya Natasha. Serta saudara-saudara penulis yaitu Fitriana.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016; Terimakasih atas semuanya. Hari- hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan penulis pastikan kalian menjadi kenangan yang terindah dalam hidup ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Aamiin Yarabbal Aalamiin.

Wassalamualaikum wr.wb

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

**Eka Aulia Putri**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	13
A. STUDI KEPUSTAKAAN.....	13
1. Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Pemerintahan.....	14
3. Pemerintah Daerah.....	16
4. Pemerintah Desa.....	18
5. Inovasi.....	19
6. Program.....	23
7. Implementasi Kebijakan.....	26
B. Peneliti Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Konsep Operasional Variabel.....	31
E. Operasional Variabel.....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV : GAMBARAN OBYEK PENELITIAN</b> .....	37
A. Letak Geografis Kecamatan Pinggir.....	37
B. Pemerintahan.....	39
C. Penduduk.....	40
D. Pendidikan.....	40

<b>BAB V : PEMBAHASAN</b> .....	41
<b>A. IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN BENGKALIS STUDI KECAMATAN PINGGIR</b> .....	41
1. Komunikasi .....	41
2. Sumberdaya.....	53
3. Disposisi.....	58
4. Struktur Organisasi.....	61
<b>B. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN BENGKALIS STUDI KECAMATAN PINGGIR</b> .....	64
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	71

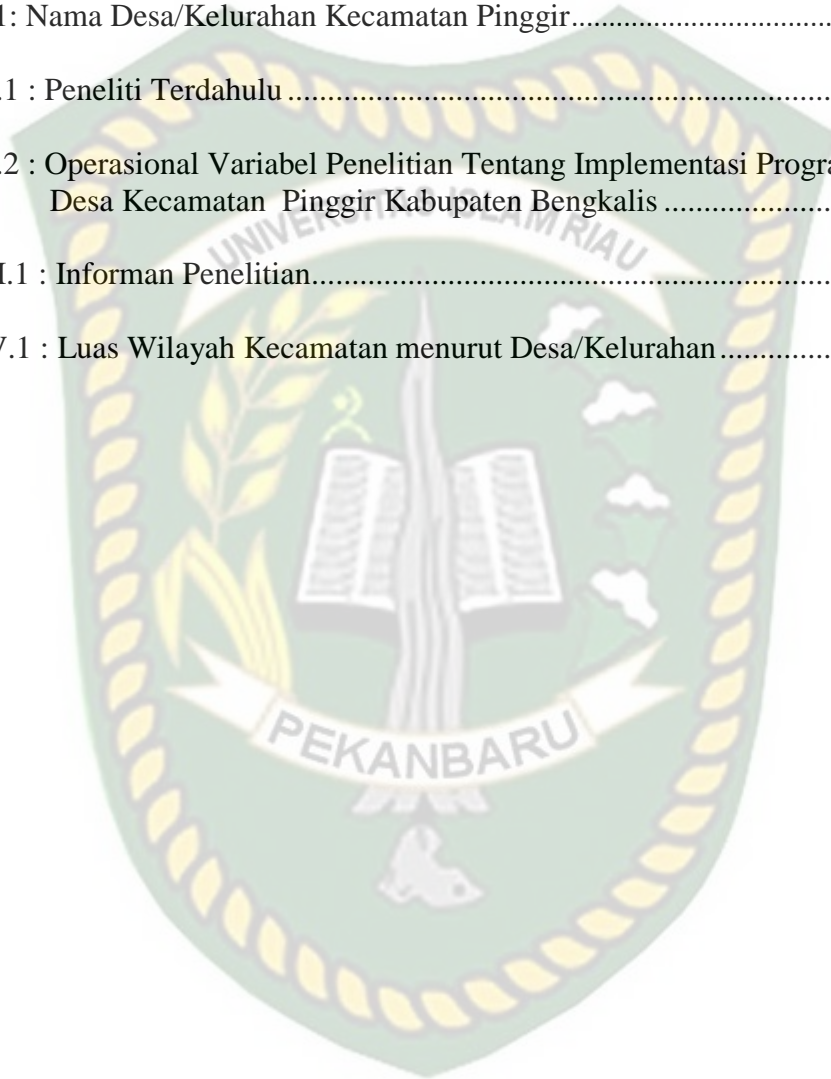
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



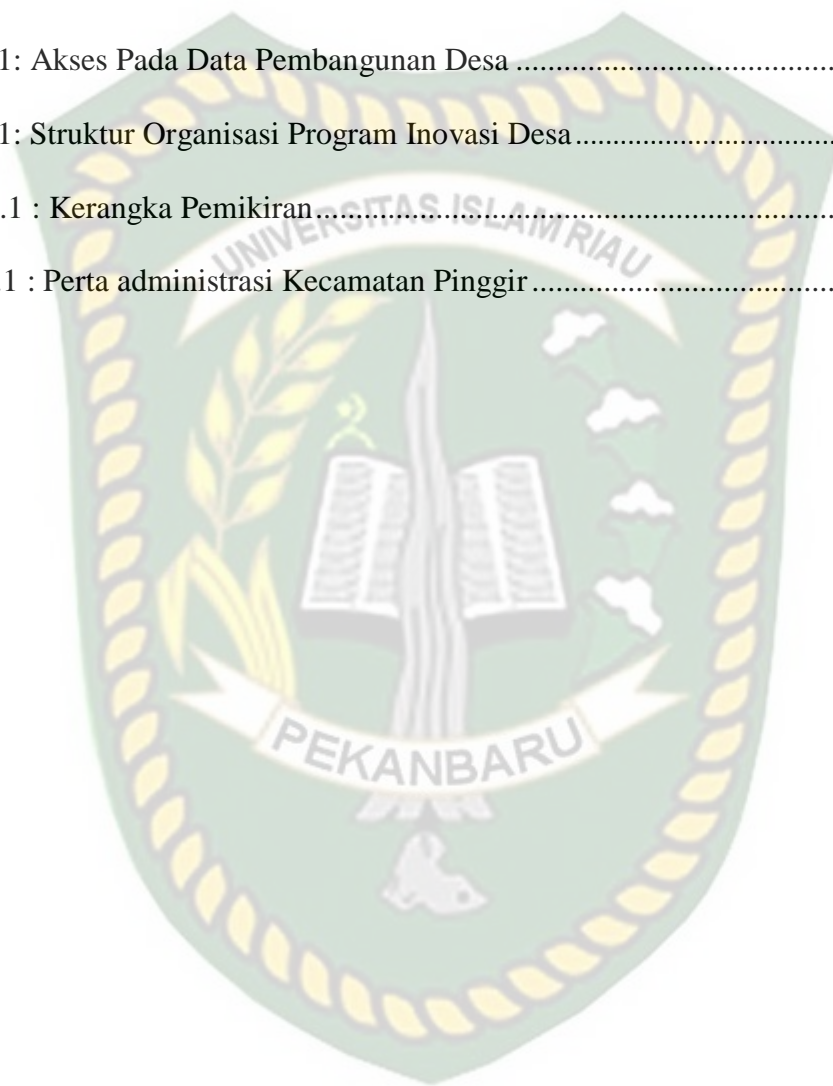
## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1: Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Pinggir.....	10
II.1 : Peneliti Terdahulu .....	29
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis .....	32
III.1 : Informan Penelitian.....	34
IV.1 : Luas Wilayah Kecamatan menurut Desa/Kelurahan .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1: Akses Pada Data Pembangunan Desa .....	6
I.1: Struktur Organisasi Program Inovasi Desa.....	7
II.1 : Kerangka Pemikiran.....	30
4.1 : Peta administrasi Kecamatan Pinggir.....	37



**PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Aulia Putri  
NPM : 167310497  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)

Atas naskah yang didaftarkan pada Konfrehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021



**EKA AULIA PUTRI**

# **IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KECAMATAN PINGGIR)**

## **ABSTRAK**

**Oleh**

**EKA AULIA PUTRI**

Penelitian ini dilakukan atas dasar belum optimalnya pelaksanaan mengenai program inovasi desa di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program inovasi desa (PID) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengimplementasi program inovasi desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum terlaksananya Implementasi Program Inovasi Desa. Kesimpulan dari Penelitian ini berdasarkan Indikator Komunikasi yaitu Pemerintahan Kecamatan Pinggir telah melaksanakan Komunikasi dalam Pelaksanaan PID terhadap Pemerintahan desa. Pada Indikator Sumber Daya yaitu Pelaksanaan PID dilaksanakan Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), Pada Indikator Disposisi yaitu Pelaksana PID belum memahami tentang program inovasi desa sehingga belum ada pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan PID, Pada indikator Struktur Birokrasi yaitu belum ada struktur tentang pelaksanaan program inovasi desa. Saran penelitian ini kepada pemerintahan kecamatan pinggir diharapkan lebih memperhatikan program yang akan dilaksanakan dengan memaksimalkan peran dan terhadap pemerintah desa hendaknya lebih diperhatikan potensi yang ada didesa dan melestarikan Sumber Daya Alam yang ada sesuai kemampuan desa.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Inovasi Desa**

**IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE INNOVATION PROGRAM OF  
BENGKALIS DISTRICT (STUDI KECAMATAN PINGGIR)**

**ABSTRACT**

**By**

**EKA AULIA PUTRI**

This research was conducted on the basis of not optimal implementation of the village innovation program in Pinggir District, Bengkalis Regency. The purpose of this study was to determine how the implementation of the village innovation program (PID), Pinggir sub-district, Bengkalis district, and to determine the obstacles in implementing the village innovation program, Pinggir sub-district, Bengkalis district. The research method used is qualitative. The research result of this research is the implementation of the Village Innovation Program has not been implemented yet. The conclusion of this study is based on communication indicators, namely the Pinggir sub-district government has implemented communication in the implementation of PID to village government. In the Resource Indicator, namely PID Implementation is carried out by the Village Innovation Implementation Team (TPID), the Disposition Indicator is that PID Implementers do not understand the village innovation program so there is no accountability regarding the implementation of PID, In the Bureaucratic Structure indicator, namely there is no structure regarding the implementation of the innovation program village. Suggestions for this research to the sub-district government are expected to pay more attention to the programs that will be implemented by maximizing the role and towards the village government, it should pay more attention to the potential that exists in the village and conserve existing natural resources according to village capacity.

**Keywords: Implementation, Program, Village Innovation**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-undang 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan, dan desa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Pedoman sangat penting untuk menjelaskan tentang desa secara baik untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebuah peraturan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas mensejahterakan masyarakat desa, oleh karena itu dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal pembangunan harus melibatkan masyarakat desa untuk memperdayakan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan desa harus bertujuan merubah kehidupan masyarakat desa dengan mengedepankan keperluan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan tekecil dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Mengenai kedudukan desa, desa pada awalnya merupakan kesatuan masyarakat hukum ( dalam hukum adat) yang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam sejarahnya, desa dengan otonomi aslinya mulai tereminasi dengan intervensi dari pemerintah superdesa, baik sebelum kemerdekaan.

Dalam pembangunan yang lebih maju sangat diharapkan orang-orang yang kreatif dan berpikir inovasi, baik itu bertujuan untuk pembangunan fisik dan Sumber Daya Manusia di dalam sebuah desa ataupun kota. Di Negara Indonesia kebanyakan desa belum bisa memanfaatkan atau mengelola desa untuk jadi Desa yang maju atau desa yang mandiri.

Dengan hadirnya, Program Inovasi Desa yang di buat oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat diharapkan bisa mengatasi pemerintahan indonesia menjadi pemerintahan desa yang bisa mewujudkan desa yang mandiri dan berinovasi dalam potensi lokal serta pembangunan desa dan kemiskinan. Dalam meningkatkan kualitas dana desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, dan membangun desa yang mandiri dilaksanakan Program Inovasi Desa yang sumbernya dari *internasional bank for reconstruction and development*.

Ketentuan umum mengenai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan tempat serta pendelegasian alokasi wewenang serta otononom dalam pengangguran.

Program Inovasi Desa merupakan program desa memperdayakan masyarakat terfokus dalam 3 sasaran. Sasaran fokus inovasi desa adalah pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan dan peningkatan pengguna dana desa agar tidak terfokus pada infrastruktur fisik yang selama ini kurang memperhatikan tentang ekonomi lokal dan kewirausahaan masyarakat.

Program Inovasi Desa dirancang untuk mendorong dan fasilitas penguatan kapasitas desa untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendes PDTT, melalui produktifitas perdesaan yang bertumpu pada:

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik antar Desa, produk unggulan desa guna mendinamisasikan perekonomian desa.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur.

Hal mendasar dalam rancang bangunan Program inovasi desa adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. Dan dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Hal tersebutlah diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Program inovasi desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dengan dukungan pendanaan dan perancangan program bersama Bank Dunia, melalui rekruturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendamping Desa dalam pelaksanaan Undang-undang Desa.

Unit Pelaksana Program bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan teknis Implementasi program inovasi desa terdiri dari:

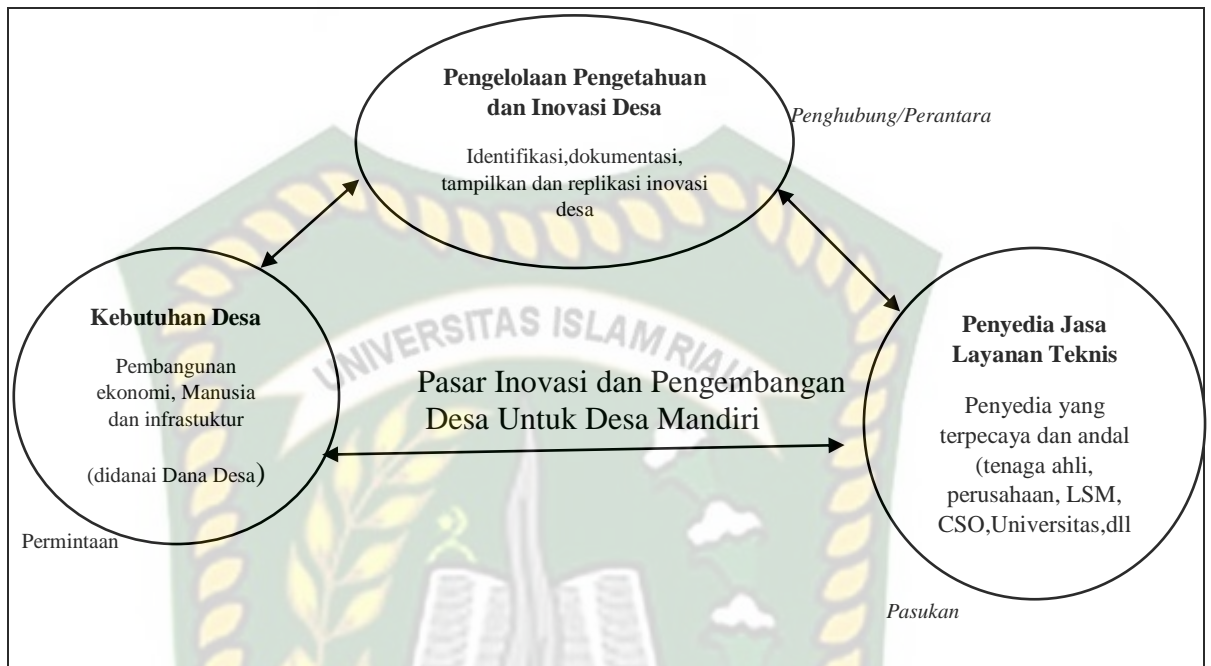
1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (PPMD), bertindak selaku unit Pelaksana Program ditingkat Nasional.
2. Sekretariat Jenderal bertindak sebagai Unit Pelaksana Program.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Provinsi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Program Inovasi Desa diselenggarakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
4. Tim Inovasi Desa Kabupaten (TIK) dibentuk di kabupaten di danai fasilitasi oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi. Tim Inovasi Kabupaten diketuai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Koordinator program mengelola dukungan teknis dan implementasi program dan mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan dan kinerja operasional Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah dan program inovasi desa.

6. Sekretariat Program (Sekpro) adalah suatu gugus tugas dipimpin oleh Kepala Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi dan kesekretariatan yang terdiri atas tenaga ahli dan memiliki keahlian serta keterampilan di bidang Satker dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan sumber daya program inovasi desa.
7. Tim Pelaksana Inovasi Desa adalah kelompok masyarakat pengelola dana bantuan pemerintah PPID.

Dalam rangka berinovasi desa strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan di bidang:

1. Kewirausahaan dan Pengembangan ekonomi lokal.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Infrastruktur desa melalui:
  - a. Penyediaan dana operasional kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa.
  - b. Pengembangan kapasitas penyedia jasa layanan teknis.
  - c. Pengembangan sistem informasi pembangunan desa.

Gambar I.1 : Akses Pembangunan Desa.



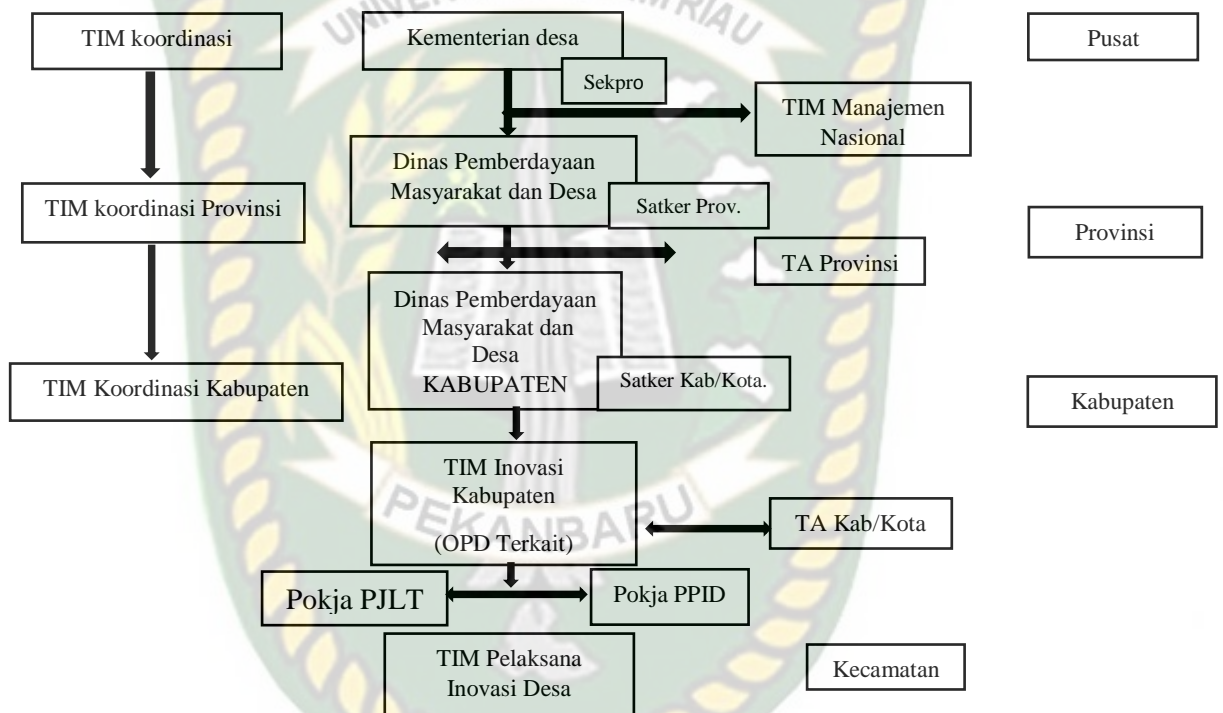
Sumber: Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Kemendes PDTT

Kemudian program inovasi desa memiliki komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Dana bantuan pemerintah pengelolaan pengetahuan dan Inovasi Desa dana bantuan pemerintahan merupakan dana operasional kegiatan yang dialokasikan di kecamatan dan digunakan membiayai kegiatan pengelolaan pengetahuan.
2. Pengembangan kapasitas penyedia jasa layanan teknis adalah organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis layanan teknis yang disediakan PJLT meliputi tiga bidang yang tidak dapat diberikan pendamping profesional:
  - a. Kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal.
  - b. Pengembangan sumber daya manusia.
  - c. Infrastruktur desa.

3. Pengembangan sistem informasi pembangunan desa merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan, evaluasi dan analisa data desa yang ditujukan mendukung percepatan pembangunan desa dan produktifitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa.

Gambar I.2 : Struktur Organisasi Program Inovasi Desa Dari Pusat-Daerah



Sumber: Satker dalam hiraki Kementerian Desa PDTT (Pusat-Daerah).

Pada kondisi tersebut adanya Program Inovasi Desa (PID) diharapkan banyak manfaat untuk pembangunan desa yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indoensia Nomor 83 Tahun 2017, yaitu :

1. Fasilitas dan pendamping untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan desa lainnya.
2. Fasilitas dan pendamping untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
3. Desa dapat memanfaatkan jasa layanan teknis dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
4. Desa memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

Sebuah keberhasilan suatu desa berkaitan dengan apa yang telah di inovasi di dalam desa sesuai dengan potensi lokal yang ada dengan bertujuan kesejahteraan masyarakat desa, untuk program yang dilaksanakan dalam program inovasi ini adalah jalan memperbaiki kebutuhan desa solusi dalam kebutuhan desa dalam mewujudkan desa yang mandiri.

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas.

Keputusan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 menjelaskan tujuan Program Inovasi desa adalah untuk meningkatkan kualitas pengguna dana desa



melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam rangka mencegah upaya ini digarapakan mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJM 2015-2019.

Keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan untuk desa-desa di Indonesia bukan sekedar retorika termasuk di Kabupaten Bengkalis. Setelah pemerintah menyalurkan program bantuan dana desa kini dilanjutkan dengan Program Inovasi Desa (PID). Hadirnya program inovasi desa menjadikan Kabupaten Bengkalis sangat mendukung kegiatan ini hal ini dilatar belakangi oleh dibentuknya PID oleh Kemendes PDTT dimana dengan kewenangan diberikan ke desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan dari data Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Pinggir adalah 2503 KM<sup>2</sup> dengan desa terluas adalah desa Muara Basung seluas 378,00 atau sebesar 15,10 % dari luas Kecamatan Pinggir keseluruhannya.

Berikut ini Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir.

Tabel I.2 : Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Pinggir

No.	Desa/Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK
1	Kelurahan Balai Raja	5.175 jiwa
2	Kelurahan Titian Antui	18.359 jiwa
3	Desa Pinggir	7.060 jiwa
4	Desa Muara Basung	11.201 jiwa
6	Desa Balai Pungut	2.019 jiwa
7	Desa Semunai	4.882 jiwa
8	Desa Tenganau	6.351 jiwa
9	Desa Buluh Apo	1.033 jiwa
9	Desa Sungai Meranti	5.568 jiwa
10	Desa Pangkalan Libut	3.538 jiwa

Sumber : Kecamatan Pinggir, 2020

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dilaksanakan sosialisasi inovasi desa (PID) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017.

Dan dibentuknya Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) melalui musyawarah antar desa dibalai desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, diharapkan tim tersebut bisa berkontribusi agar tercapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kemudian dilaksanakan Sosialisasi program inovasi desa dilaksanakan di

Kecamatan Pinggir yang di buka langsung oleh Sekretaris Kecamatan Pinggir Drs. H. Sutrisno.

Sejalan dengan hal diatas, berdasarkan prasurevei penulis menemukan beberapa fenomena yang dijumpai yaitu:

1. Belum adanya komunikasi dalam penyaluran informasi antara Pemerintahan Kecamatan Pinggir terhadap Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa.
2. Belum optimalnya Sumber Daya sebagai pelaksana utama program inovasi desa yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pinggir terhadap Pemerintahan desa dalam menjalankan penerapan inovasi sesuai dengan kemampuan desa.
3. Belum optimalnya Disposisi dalam sikap pelaksana dan pemahaman mengenai program pelaksanaan program inovasi desa yang diselenggarakan Kecamatan Pinggir terhadap Pemerintahan Desa.
4. Belum adanya struktur mengenai program pelaksanaan inovasi desa dalam kegiatan pelaksanaan program inovasi desa Kecamatan Pinggir terhadap Pemerintahan Desa Kecamatan Pinggir.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Program Inovasi Desa Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program inovasi desa (PID) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengimplementasi program inovasi desa (PID) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep implementasi program inovasi desa.
- b. Secara Praktis, sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan Implementasi Program Inovasi Desa.
- c. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Implementasi Program Inovasi Desa atau lainnya mengenai implementasi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan.

Menurut Ndraha (2011:7) mendefinisikan ilmu pemerintah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (Unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan koordinasi ada bidang pengurus, pengaturan, kepemimpinan dan kooridnasi pemerintahan pusat baik dengan daerah, rakyat dengan pemerintahan Inu Kencana Syafie (dalam Heni, 2011:15)

Poulje (dalam Heni, 2011:16) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Ketika definisi ilmu pemerintahan (*Bestuurskunde*) dipelajari dan diterbitkan melalui buku *algemene inleiding tot de bestuurskunde* kaiya poulje, dan diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh B. Mang Reng Say di bawah judul pengantar umum ilmu pemerintahan. Ilmu itu di didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan tanpa merugikan orang secara tidak sah.

Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara. Supriyanto (dalam Heni, 2009:26).

Di Indonesia, Ilmu pemerintahan di definisikan dengan pengertian yang berbeda-beda. Alfan gaffar (dalam Heni, 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

## **2. Pemerintahan**

Agar penelitian ini mengandung unsur penelitian ilmiah maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahannya yang diteliti. Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Dalam ilmu negara, ilmu politik dikenal istilah pemerintahan, sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan negara biasanya disebut dengan pemerintahan.

Menurut Syafie (dalam Basofi, 2003:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga yang diperintah dengan yang diperintah.

Kata pemerintah berasal dari perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan

antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan''pe'' menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran ''an'' menjadi pemerintahan yang berarti pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau perihal. syafiie dan Andi azikin( dalam basofi, 2008:5).

Menurut U. Roshental (dalam syafiie,2009:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Ndraha (dalam Basofi,2003:6) pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan sipil sebagai setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakatnya dalam suatu pemerintahan/Negara.

Selanjutnya dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Nurcholis (dalam basofi,2005:132).

Selanjutnya C.F Strong (dalam Basofi, 2005:22) mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam dan luar.

### **3. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi lagi atas daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Konsep Pemerintah Daerah berasal dari terjemahan konsep *local governance* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama berarti pemerintah lokal, kedua pemerintahan lokal, ketiga berarti wilayah lokal. Hoessein (dalam Hanif, 2007:24).

Menurut The Liang Gie (dalam Hanif, 1988:44), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setepat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah.

Setiap Pemerintah di pimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing drbagai kepala Pemerintah Dearah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk



kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi terutama dinas-dinas daerah.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintah kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebaifai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Tjahja Supriatna (dalam Hanif, 2007) yang menyetir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan unsur-unsur pemerintah daerah meliputi:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.

- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintah yang dipilih oleh penduduk setempat.
- d. Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundnagan.
- e. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintah daerah diatas masih ditambah dengan pemerintah daerah melaksanakan pembanunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga,institusi kegiatan pemerintahan daerah.

### **3. Pemerintah Desa**

Menurut Widjaja (dalam Sandika,2012:3) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Menurut silahudin (dalam Sandika,2015:12) kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahanan ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata perhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan menerima dan

kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Pemerintahan Desa menurut IGO (*Inlansche Gemeente Ordonnantie* adalah peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan lain yang masih berlaku atau belum diganti ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). IGO sengaja diuraikan meskipun secara singkat karena dojumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut IGO dengan perubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya. Bayu Suningrat (dalam Hanif, 1992:92).

Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karna adanya gerakan pembangaunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. Sadu Wasistiano (dalam Hanif, 2006:4).

#### **4. Inovasi**

Dalam bahasa inggir Inovasi yaitu Perubahan. Yaitu sebagai proses kegiatan dan pemikiran berguna menemukan sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat dalam kehidupan.

Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditunjukkan pada hasil yang telah dicapai terutama pengguna pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Makmur & Rohma (dalam Zulfa nurdin,2012:9).

Menurut Oslo Manual (dalam Zulfa Nurdin, 2013:58), Inovasi memiliki aspek yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode, pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi.

Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan Mulgan (dalam Zulfa Nurdin, 2016:12) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

Adapun inovasi menurut Evert M.Rogers (dalam Suwarno, 2008:9) adalah sebagai ide, gagasan, praktel atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan (dalam Zulfa Nurdin,2009:36) sebagai perubahanyang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru.

Sedangkan Fontana (dalam Zulfa Nurdin,2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan era baru kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen.

Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (Dalam Zulfa Nurdin,2009:3) menerangkan salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan lingkungan bisnis yaitu mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk menjadi competitive.

Borrins (dalam Zulfa Nurdin, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature inovasi terdapat perbedaan antara temuan (*invention*), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi juga yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan.

Secara mikro, konsep inovasi dari sisi fokus penelitian terdapat dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah "*Innovation as a process*", dimana inovasi didefinisikan dengan lebih menekankan pada proses inovasi dalam organisasi dan proses sosial yang menghasilkan inovasi sebagai kreatifitas individu, budaya organisasi, kondisi lingkungan dan faktor-faktor sosial-ekonomi.

Pendekatan kedua adalah *“Innovation as an outcome”* dimana dikatakan bahwa inovasi adalah produk yang dibuat atau penciptaan produk yang memiliki nilai tambah. Dalam perspektif inovasi sebagai sebuah hasil *an outcome*, inovasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu inovasi radikal yaitu adanya teknologi yang mendorong inovasi dalam menciptakan suatu yang baru bagi perusahaan dan juga untuk pasar atau pelanggan. Inovasi inkremental yaitu biasanya dikategorikan sebagai inovasi.

yang berorientasi pasar karena ide-ide yang didapatkan dalam penciptanya produk baru berasal dari pasar, sehingga sering disebut yang berorientasi pasar.

Konsep inovasi jasa pertama kali dibahas oleh Miles tahun 1993 dan telah dikembangkan dalam dua dekade terakhir. Berikut merupakan konsep inovasi jasa yang dikemukakan oleh Miles :

1. Inovasi dalam pelayanan, misalnya dalam produk. Produk jasa baru atau peningkatan produk jasa (komoditas atau pelayanan publik) sering kali dibedakan dengan *“inovasi teknologi”* meskipun produk jasa dapat memiliki elemen teknologi. Inovasi jasa terkait erat dengan desain layanan dan *“pengembangan layanan baru”*
2. Inovasi dalam proses, yaitu cara-cara baru atau peningkatan dalam proses merancang dan memproduksi jasa. Ini termasuk dalam sistem pelayanan meskipun sering dianggap sebagai inovasi produk jasa. Inovasi semacam ini mungkin berbasis teknologi, teknik atau keahlian, atau organisasi kerja (misalnya restrukturisasi kerja antara para profesional).

3. Inovasi dalam perusahaan jasa, organisasi dan industri. Melalui inovasi organisasi, produk jasa, proses, inovasi, dan pengelolaan proses inovasi dalam organisasi jasa.

Inovasi adalah salah satu pilihan korporasi dalam menghadapi persaingan pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan. Freeman (dalam Zulfa Nurdin,2004) menganggap inovasi sebagai upaya dari perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi untuk mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang baru untuk industri.

## **5. Program**

Program adalah hal utama yang dilakukan demi terciptanya proses kegiatan. Sebuah program dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi masyarakat. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Chales. O (dalam Abdul,2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian.

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi.

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

### 3. Penerapan atau Aplikasi.

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan kegiatan sehingga berbenturan dengan program lainnya.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Riggs (dalam Abdul,2005-54).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Menurut Karding (dalam Abdul,2008:33) bahwa program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program arti khusus dan program dalam arti umum.



Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana apa yang dilakukan. Apabila ‘’program’’ ini dikaitkan dengan evaluasi program maka didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau kesatuan kegiatan merupakan realisasi atau implementasi kebijakan, berlangsung dalam proses yang bersinabung, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

1. Program adalah realisasi atau implementasi suatu kegiatan.
2. Terjadi dalam kurun waktu lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi, berkesinabungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Secara umum pengertian program adalah merupakan bagian penjabaran suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dari pelaksana dari suatu kegiatan.

Menurut Sujianto (dalam Abdul,2008:32) program adalah suatu komplek dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, dan langkah-langkah yang harus diambil. Sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu

Selain itu, Abadi dalam Jones (dalam Abdul,2009:11) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil,

sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan sebaik apapun tanpa adanya implementasi tidak akan mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai.

## **6. Implementasi Kebijakan.**

Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan tidak lebih dan tidak kurang untuk menerapkan program-program atau melebihi formulasi kebijakan.

George Edwards III (Henri, 2008:2015) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan-rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? Untuk itu diperlukan pertimbangan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

### **1. Komunikasi.**

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.

### **2. Sumber Daya.**

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program atau, karena bagaimana pun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi).

Tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

### 3. Sikap Disposisi.

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel berat pada implementor kebijakan atau program, karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi.

### 4. Struktur Birokrasi.

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legislatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan Edward III (dalam Heni,2008:90).

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri. Tangklisan, (Heni,2002:7).

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat hingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana diharapkan. Affan Gaffar (dalam Henri, 2009:29). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan perangkat peraturan lanjutan yang merupakan implemtasi dari kebijakan tersebut.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenanrnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang akibatnya akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang negatif maupun yang positif. Wahab (Dalam Henri, 2002:9). Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atau tujuan yang hendak dicapai dan komitmen pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, penerapan kebijaksanaan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif

bagi pemecah masalah. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan. Tangklisan (dalam Henri, 2002:11).

## B. Peneliti Terdahulu

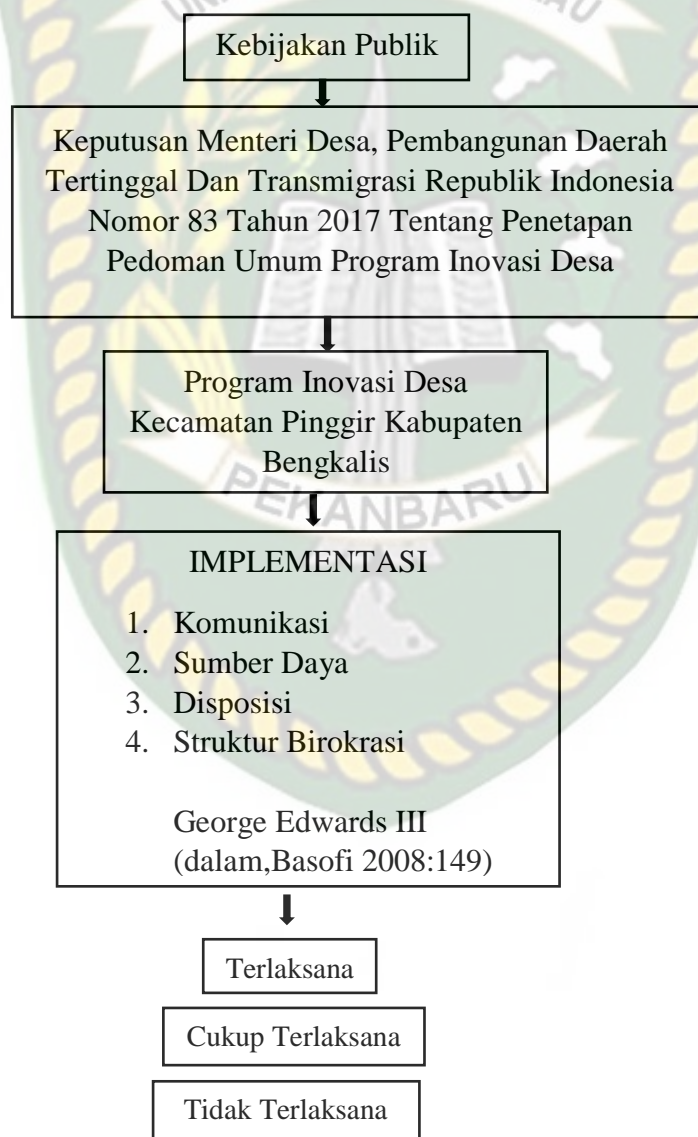
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Program Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. <b>Abdul Haris Djiwandono</b> <i>Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2017)</i>	1. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2. Sama-sama meneliti tentang implementasi	1. Tempat penelitian peneliti di Kecamatan Pinggir, sedangkan peneliti terdahulu di Kecamatan Teluk Naga
2	Implementasi Inovasi Kebijakan Program Pidu Di Kabupaten Pinrang. <b>Inten Suweno Anugraha</b> <i>Skripsi Universitas Hasanudin (2016)</i>	1. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 2. Sama-sama menggunakan pendekatan implementasi menurut George Edwards III	1. Tahun Penelitian peneliti tahun 2020 sedangkan peneliti terdahulu pada tahun 2016.
3.	Analisis Program Inovasi Di Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Desa Bangun Harja Kabupaten Ciamis. <b>Asep Nurwanda, Elis Badriah.</b> <i>Jurnal Arsip Vol 7, No. 1, 2020</i>	1. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	1. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan implementasi sedangkan peneliti terdahulu analisa.

### C. Kerangka Pikir

Adapun Kerangka Pemikiran yang ditetapkan untuk mengetahui Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir dapat dilihat sebagai berikut:

GambarII.1: Bagan Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk mengindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
2. Implementasi Kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
4. Kebijakan adalah keputusan kebijakan yang tetap yang dicarikan oleh konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
5. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksanaan program dengan kelompok sasaran program.
6. Sumber Daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepala kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
7. Disposisi adalah suatu sikap pelaksanaan untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksanaan untuk melaksanakan program.

8. Struktur Birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

#### E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indicator	Sub Indikator
1	2	3	4
Impelementasi kebijakan adalah kegiatan yang komplek dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan edward III (dalam subarsono, 2008:90)	Impelementasi Program Inovasi Desa.	1. Komunikasi  2. Sumber Daya  3. Disposisi  4. Srtuktur Birokrasi	a. Sosialisasi b. Pengarahan c. Penyuluhan  a. SDM b. Anggaran c. Fasilitas  a. Pemahaman b. Pengetahuan c. Sikap  a. Tugas b. Tanggung Jawab

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

#### A. Tipe Penelitian

Tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang di teliti dalam penelitian. Kemudian melalui kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang di teliti, dalam hal ini adalah Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap bersal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara Induktif. Creswell (dalam Basofi,2016:4).

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Pinggir, Khususnya di Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis, untuk melakukan observasi

didalam penelitian ini karena berdasarkan prasurvey kantor tersebut merupakan badan yang langsung turun melaksanakan Program Inovasi Desa.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaanya diteliti. Sukandarumidi (dalam heni, 2002:65) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek tentang Implementasi program inovasi desa kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel III.2 : Informan Penelitian

<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	
Sekcam Kec. Pinggir Kabupaten Bengkalis	1	<b>Pemerintahan Camat Pinggir</b>
Ketua Seksi PMD Kec.Pinggir	1	
Kepala Desa Semunai	1	<b>Lembaga Pemerintahan Desa</b>
Kepala Desa Pinggir	1	
Kepala Desa Muara Basung	1	<b>Masyarakat Desa</b>
Masyarakat Desa Pinggir	1	
Masyarakat Desa Muara Basung	1	

Sumber: Modifikasi Penelitian

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer merupakan suatu sumber daya yang diperoleh langsung dari informen dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan data primer dalam penelitian ini yaitu didapat dari narasumber langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, dimana data tersebut sudah berbentuk data yang sudah ada artinya tidak perlu di olah lagi. Dan diperoleh dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang sudah ada.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara  
Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai baha, keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diselidiki.
2. Observasi  
Yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung sesungguhnya di lapangan.
3. Dokumentasi  
Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

## **F. Teknik Analisi Data**

Analisis data adalah mengelompokkan membuat suatu urutan memanipulasi serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara.

Berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

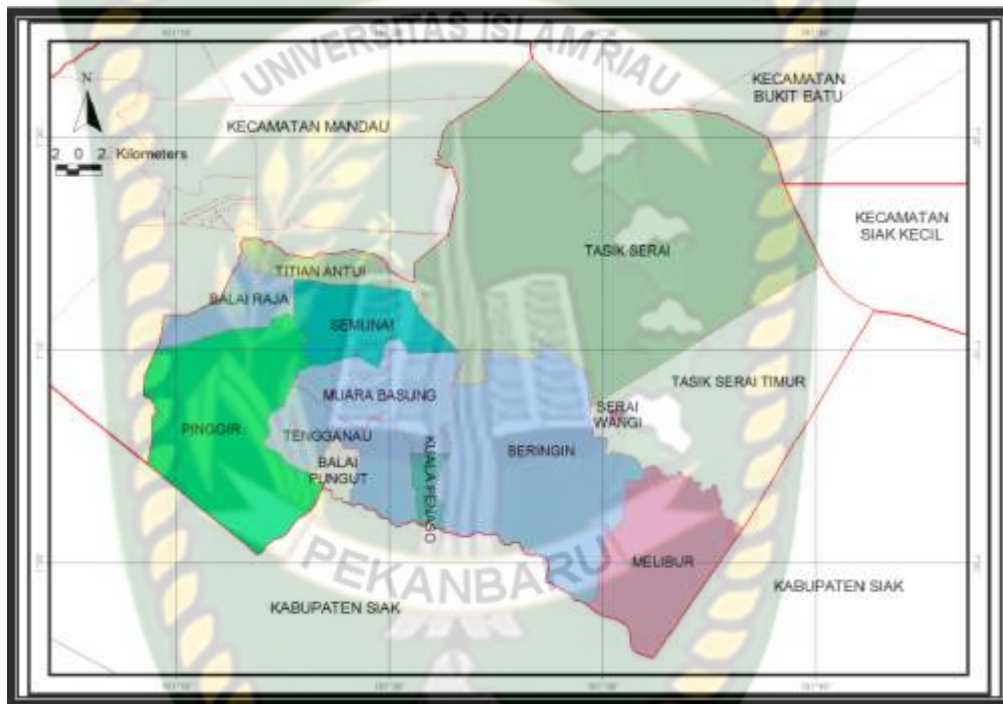
Setelah data yang di kumpulkan selanjutnya dan diolah secara kualitatif kemudian analisis dengan mendeskripsi atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan fakta-fakta dilapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan kata cara ilmiah.

## BAB IV

### GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Kecamatan Pinggir

Gambar IV.1 Peta Administrasi Kecamatan Pinggir



Sumber: Kecamatan Pinggir 2020

Kecamatan Pinggir dengan ibu kota Pinggir merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Bengkalis. Terletak di Pulau Sumatera yang terbentang diantara  $0^{\circ}56'12''$  Lintang Utara -  $1^{\circ}28'17''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}56'10''$  Bujur Timur -  $101^{\circ}43'26''$  Bujur Timur.

Kecamatan Pinggir memiliki batas-batas:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Bukit Batu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Siak

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu

Luas wilayah kecamatan Pinggir sebesar 2.503 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi yang memiliki luas wilayah terbesar di kecamatan Pinggir adalah desa Muara Basung yang luasnya 378km<sup>2</sup> atau 15,10% dari keseluruhan luas kecamatan Pinggir. Desa yang terdekat dengan Kecamatan Pinggir adalah Desa Pinggir.

Desa/kelurahan Kecamatan Pinggir merupakan daerah dataran secara Geografis. Karena tidak berbatasan dengan garis pantai, begitu juga jika dilihat berdasarkan topografinya.

Tabel IV.1: Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan <i>Villages</i>	Luas Wilayah <i>Wide Area (km<sup>2</sup>)</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Pinggir	230	9,19
Semunai	220	8,79
Tengganau	260	10,39
Balai Pungut	180	7,19
Muara Basung	378	15,10
Kuala Penaso	230	9,19
Beringin	250	9,99
Melibur	230	9,19
Serai Wangi	10	0,40
Tasik Serai	370	14,78
Titian Antui	25	1,00
Balai Raja	30	1,20
Tasik Serai Timur	90	3,60
Buluh Apo	-*)	-*)
Pangkalan Libut	-*)	-*)
Sungai Meranti	-*)	-*)
Tasik Serai Barat	-*)	-*)
Tasik Tebing Serai	-*)	-*)
Koto Pait Beringin	-*)	-*)
<i>Jumlah Total</i>	2.503	100

Sumber: Kecamatan Pinggir, 2020

## B. Pemerintahan

Kecamatan pinggir terdiri dari 9 desa dan 2 kelurahan. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa, dan setiap kelurahan di pimpin oleh kelurahan. Dari status kedudukannya bahwa kelurahan yang ada dikecamatan pinggir adalah kelurahan Balai Raja dan Kkelurahan Titian Antui selebihnya adalah desa yaitu Desa Pinggir, Desa Muara Basung, Desa Balai pungut, Desa Semunai, Desa Tenganau, Desa Buluh Apo, dan Desa Sungai Meranti.

Tabel IV.1 : Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Pinggir

No.	Desa/Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK
1	Kelurahan Balai Raja	5.175 jiwa
2	Kelurahan Titian Antui	18.359 jiwa
3	Desa Pinggir	7.060 jiwa
4	Desa Muara Basung	11.201 jiwa
6	Desa Balai Pungut	2.019 jiwa
7	Desa Semunai	4.882 jiwa
8	Desa Tenganau	6.351 jiwa
9	Desa Buluh Apo	1.033jiwa
9	Desa Sungai Meranti	5.568 jiwa
10	Desa Pangkalan Libut	3.538 jiwa

Sumber : Kecamatan Pinggir, 2020

### **C. Penduduk**

Jumlah penduduk kecamatan Pinggir pada tahun 2020 adalah 66.832 jiwa. Dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 34.763 jiwa dan perempuan sebanyak 32.069 jiwa. Dengan luas 2.503 km<sup>2</sup> jumlah masyarakat Kecamatan Pinggir adalah 66.832 jiwa.

### **D. Pendidikan**

Pada tahun 2020, Kecamatan Pinggir memiliki Taman Kana-kanak sebanyak 40, 51 Sekolah Dasar, 19 Sekolah tingkat Pertama, 9 Sekolah Tingkat Menengah Umum, 3 Sekolah menengah Kejuruan (SMK).





## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)

Hadirnya Program Inovasi Desa diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat. Dan mampu untuk memperdayakan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan desa. Berikut diuraikan hasil penelitian terkait implementasi program inovasi desa di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diukur berdasarkan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

##### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Hanif (2010:97), Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Pimpinan harus berkomunikasi kebijakan yang akan dilaksanakan kepada yang akan bertanggung jawab atas kebijakan agar menghasilkan kinerja yang optimal.

Maksud Komunikasi dalam penelitian ini merupakan cara penyeluran informasi kepada masyarakat yang apabila dilakukan dengan baik maka akan memberikan hasil implementasi yang baik. Komunikasi merupakan indikator paling penting dalam proses implementasi suatu kebijakan karena semua

dimulai dari komunikasi. Dalam indikator komunikasi peneliti menggunakan 3 sub indikator yaitu sosialisasi, pengarahan, dan penyuluhan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan. Charles R wright dalam Sutaryo (2004:150).

Maksud sosialisasi dalam penelitian ini adalah melalui proses sosialisasimerupakan langkah awal dalam memulai sebuah pelaksanaan program. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang atau masyarakat yang menjadi target sebuah program, serta bagaimana orang atau masyarakat tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Salah satu cara yang digunakan oleh Kecamatan Pinggir untuk memberikan informasi kepada setiap desa adalah dengan cara sosialisasi. Hal ini dipertegas oleh Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang mengatakan bahwa:

*“Kegiatan itu belum terlaksana ke desa-desa. Tetapi sudah di Informasikan oleh pusat melalui media jaringan kepada kami, agar diselenggarakannya sosialisasi mengenai Program Inovasi Desa dengan aturan yang ada, atau dengan menggunakan pedoman inovasi desa. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi secara langsung dengan memanggil setiap kepala desa di Kecamatan Pinggir. Kami mensosialisasikan bagaimana implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis”.*(Wawancara, 7 Januari 2021).

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian benar adanya Program Inovasi Desa belum dilaksanakan tetapi sudah disosialisasi kepada Kepala Desa yang berada di Kecamatan Pinggir Tepatnya tanggal 22 Maret 2019 di Kecamatan Pinggir diseleggarakan pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) KecamatanPinggir.

*“Dalam rangka mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan maka proses sosialisasi ini menjadi penting sebagai bagian dari langkah awal kita untuk melaksanakan program inovasi desa (PIDP). Proses sosialisasi awal dilakukan oleh Sekcam sebelumnya yaitu Bapak Drs. H. Sutrisno”. (Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan Observasi penelitian bahwa benar pada sebelumnya pada tahun 2019 Bapak Drs H.Sutrisno adalah Sekretaris Camat pada sebelumnya yang bergerak dalam sosialisasi program inovasi desa tersebut.

Sosialisasi dikecamatan Pinggir pada saat itu dilaksanakan di Balai desa Kecamatan Pinggir, dihadiri oleh 9 Desa yaitu Desa Pinggir, Desa Muara Basung, Desa Balai Pungut, Desa Semunai, Desa Tenganau, Desa Buluh Apo, Desa Sungai Meranti, dan Desa Pangkalan Libut. Yang akan siap menjalankan program inovasi desa.

Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengatakan:

*“Program Inovasi Desa (PID) ini sangat membantu bagi desa dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa.Program yang digagas oleh Kemendes ini sangat bagus, karena dalam PID ini nantinya pemerintah desa dapat menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap optimalisasi pengelolaan dana desa”. (Wawancara, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian bahwa bapak Febrizal, ST mengetahui bagaimana fungsi dari sosialisasi dan manfaatnya bagi desa-desa terkhusus Kecamatan Pinggir.

Diterapkannya Program Inovasi Desa dan dibentuk Tim Pelaksana Kecamatan Pinggir, diharap dapat memberikan pembekalan agar Tim pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan pedoman PID yang telah ditetapkan atau sesuai dengan aturan yang ada.

Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Kepala Desa Pinggir yang menyatakan bahwa:

*“Pihak kecamatan menyampaikan kepada Kepala Desa yang hadir, kedepannya melalui Program Inovasi Desa (PID) ini pengelolaan Dana Desa tidak hanya terfokus pada kegiatan infrastruktur saja akan tetapi juga di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat”. (Wawancara, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi kepada beberapa pendapat kepala desa, benar pihak kecamatan sudah menyampaikan kepada kepala desa yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir mengatakan dalam wawancara bahwa:

*“Tujuan di bentuknya Tim ini untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa (DD) di Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkalis. “Jadi, selama ini kegiatan DD hanya bertumpu pada kegiatan fisik. Harapannya ke depan ada berbagai varian dan inovasi baru terkait konsep pembangunan yang bertumpu pada 3 hal”. (Wawancara, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas ibu Suryati mengungkapkan bahwasannya mendukung dengan adanya program inovasi agar dapat terlaksana dengan konsep pembangunan.

Dilanjutkan lagi dengan tanggapan ibu Suryati, S.Sos mengatakan:

*“Nanti dari situ bisa diadopsi oleh desa lain, sehingga akan muncul berbagai konsep pembangunan yang tidak monoton atau pun stagnan, sehingga pembangunan di desa lebih inovatif dan variatif”. (Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa ibu Suryati berharap Inovasi bisa merata kedesa-desa lainnya khususnya Kecamatan Pinggir

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dilanjutkan langkah selanjutnya adalah Pembentukan Tim Pelaksana inovasi desa, yang dipimpin oleh Drs. H Sutrisno beliau adalah Sekretaris Kecamatan Pinggir sebelumnya, namun sekretaris kecamatan pada saat ini adalah Suryati S.Sos.

Berikut tanggapan bapak Adra selaku Kepala Desa Muara Basung mengatakan:

*“Dalam sosialisasi Program PID diharapkan dapat berjalan efektif dan bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dari pengelolaan Dana Desa ini dapat tercapai”. (Wawancara dengan bapak Adra selaku Kepala Desa Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan Bapak Akhyar Mukmin berharap Program Inovasi Desa bisa bermanfaat bagi desa-desa khususnya di Kecamatan Muara Basung. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan Bapak Umar B mengatakan:

*“Sosialisasi dikecamatan Pinggir tentunya mengenai Program Inovasi Desa, sebelumnya memang ada tentang program berinovasi, tetapi bukan yang dikeluarkan yang pedoman 83 tahun 2017 itu, nah kalau yang disosialisasi tentang PID 83 tahun 2017*

*sosialisasi nya memang ada tapi belum kita laksanakan programnya karna ada kendala mungkin karena Covid-19'' (wawancara 7 januari kepada kepala desa semunai)*

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dijelaskan sosialisasi memang ada tetapi belum melaksanakan program tersebut.

Program Inovasi Desa berperan sebagai salah satu cara pemerintah memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat desa.

Proses ini memanfaatkan pertukaran pengalaman dari satu desa ke desa lain melalui forum bursa inovasi desa, sehingga tumbuh semangat untuk melahirkan inovasi -inovasi baru dalam Pembangunan Desa.

#### **b. Pengarahan**

Pengarahan adalah fase kerja manajemen dimana manajer berusaha memotivasi, membina komunikasi, mengenai konflik, kerjasama, dan negoisasi. Marquis dan Huston dalam Sandika (2000:7)

Pengarahan dalam hal ini yang dimaksud dalam penelitian adalah proses memberikan instruksi kepada masing-masing pihak terkait dalam PID yaitu semua kepala desa di Kecamatan Pinggir.

Proses Pengarahan dilakukan pada 31 Desember 2019. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir:

*“Ya, pada 2 tahun lalu tepatnya tanggal 31 Desember 2019, kami mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) II Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019”. (Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian benar pada proses sosialasi sudah melaksanakan pengarahan pada musyawarah yang dihadiri beberapa kepala desa yang hadir.

Capaian Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Pinggir pada Musyawarah Antar Desa (MAD) II.

a. Capaian Bursa Inovasi Desa

Sesuai dengan juknis PID maka Bursa Inovasi Desa dilaksanakan melalui mekanisme Claster. Dimana claster ini dibagi 4 claster yaitu :

- 1) Claster I Gerbang Utama (Kec. Bantan dan kec. Bantan)
- 2) Claster II Gerbang Laksamana (Kec. Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, dan Kec. Siak Kecil)
- 3) Claster III Gerbang Permata (Kec. Mandau, Kec. Pinggir, Kec. Talang Muandau dan Kec. Bathin Solapan)
- 4) Claster IV Gerbang Pesisir (Kec. Rupal dan Kec. Rupal Utara)

Bursa Inovasi Desa Claster III Gerbang Permata dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2019 yang di hadiri dari Camat 4 kecamatan, BPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan serta Pendamping desa baik dari kabupaten dan Provinsi dengan jumlah peserta 250 Orang.

b. Capaian Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Untuk Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia TPID Kecamatan Pinggir. Pelaksanaannya pada tanggal 19 September 2019

di Gedung aula kantor Desa Pinggir. Peserta yang hadir berasal dari Kader Pembangunan Manusia dan Perangkat desa setiap desa dengan Narasumber berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Bengkalis.

c. Capaian Replikasi Inovasi

Pelaksanaan Replikasi dilakukan setelah dilaksanakannya Bursa Inovasi Desa dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kartu komitmen dan Kartu Ide masuk dalam rencana Kegiatan Pemerintah desa.

d. Capaian Kegiatan *Capturing*

Di dalam program inovasi desa ada kegiatan capturing. capturing dilakukan setelah pelaksanaan Replikasi dilakukan. Capturing ini bertujuan menangkap inovasi-inovasi yang ada di Desa untuk dapat di publikasikan dan bisa menjadi contoh ide Inovasi bagi Desa-desanya yang mempunyai karakter desa yang hampir sama.

*“Sesuai dengan juknis yang berlaku capturing dilakukan di dua desa yang ada di Kec. Pinggir yaitu Desa Sungai meranti dengan Inovasi “investasi home industri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa” dan Desa Buluh Apo dengan inovasi “Pemanfaatan perkarangan rumah dengan penghijauan dan budidaya ikan”. (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi Desa buluh apo dan Desa Sungai Meranti memang sudah melaksanakan Inovasi sesuai dengan Sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut.



e. Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring ini dilakukan memastikan Kartu Komitmen dan Kartu Ide masuk dalam Anggaran Pembelanjaan Desa untuk Tahun 2020. Dilanjutkan dengan tanggapan oleh Bapak Umar B selaku kepala desa Semunai:

*“Pengarahan dalam rapat pelaksanaan sosialisasi PID ya diharapkan dapat berjalan dengan baik, karna program PID itu membawa perubahan terkhususnya untuk Inovasi desa, sesuai dengan kebutuhan desa bukan hanya karna wacana saja”  
(wawancara 7 januari,2021)*

Tanggapan diatas menjelaskan harapan kepala desa agar PID dapat berjalan dengan baik. Dilanjutkan lagi dengan tanggapan Bapak Akhyar Mukmin tentang Pengarahan program inovasi desa :

*“Berbicara tentang pengarahan semua sudah diatur dan diarahkan dalam melaksanakan program yang telah diterapkan pihak kecamatan”*

Tanggapan diatas mengatakan bahwa pengarahan sudah dilaksanakan di kecamatan pinggir ke pemerintahan desa kecamatan pinggir.

**c. Penyuluhan**

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan. Subejo dalam sandika (2010:34).

Maksud penyuluhan dalam penelitian ini merupakan upaya menyampaikan informasi (pesan) yang berkaitan dengan bidang oleh penyuluh kepada masyarakat. Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-

upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program Inovasi Desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Tujuannya program ini antara lain untuk mendukung pembangunan desa yang lebih kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program inovasi desa, pada tingkat kecamatan akan dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya pada hari Jumat 1 Desember 2019, TPID memeriksa dan memverifikasi warga yang bercocok tanam hidroponik, dimana hal ini merupakan salah satu inovasi yang ada di Desa Pinggir. Ketua TPID menjelaskan bahwa usaha hidroponik sangat bagus untuk warga namun alangkah baiknya jika usaha ini dikembangkan secara berkelompok dan adanya ide/penemuan baru selama proses bercocok tanam hidroponik.

*“Hidroponik menjadi salah satu gebrakan kreatif dan menguntungkan dalam program inovasi desa. Hidroponik termasuk jenis pertanian yang tergolong baru dan belum banyak dibuat, menjadikan pertanian dengan sistem hidroponik menjanjikan keuntungan besar dalam membangun sistem perekonomian desa”. (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi di Desa Pinggir sudah ada tanaman Hidroponik yang sedang dikembangkan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desa tetapi itu bukan program dari PID atau

Kecamatan melainkan program dari desa nya tersebut untuk menjadi masyarakat yang berdaya.

Penggunaan lahan yang efisien tanpa menggunakan lahan tanah seperti pertanian konvensional, menjadikan hidroponik memiliki lahan tanam yang lebih fleksibel dan tidak memakan banyak lahan tanam. Di lain sisi, penggunaan produk pestisida alami membuat tanaman hidroponik lebih sehat dibandingkan dengan tanaman hasil pertanian konvensional.

Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan lahan yang sempit sekalipun. Memanfaatkan media pipa ataupun bambu yang ramah lingkungan. Pekarangan rumah yang tidak memiliki celah untuk bertani konvensional dapat diatasi dengan hadirnya inovasi pertanian hidroponik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Budiyanto selaku masyarakat Desa Pinggir yang menyatakan bahwa:

*“Hasil pertanian hidroponik juga tidak kalah dari hasil pertanian konvensional. Produk tanaman yang dihasilkan dinilai lebih alami, karena tidak menggunakan pestisida kimia”.* (Wawancara, 7 Januari 2021).

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian tanaman Hidroponik sudah menghasilkan penghasilan dalam panen tumbuhan dari hidroponik yang berada di desa pinggir.

Selain itu, tanaman hidroponik dapat dipanen tanpa menunggu musim tertentu. Alasan di atas kemudian memperkuat tanaman hasil inovasi pertanian hidroponik dapat menjadi salah satu komoditas Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) yang kemudian dapat mendorong perkembangan ekonomi yang masih dengan cara tanam yang efisien.

Kepala Desa Muara Basung pada kesempatan wawancara mengatakan bahwa:

*“Dengan hadirnya hidroponik sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif desa, tentunya tunjangan pertumbuhan ekonomi bisa tersalurkan lewat hadirnya hidroponik.”*. (Wawancara, 7 Januari 2021).

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi kepala desa muara basung mendukung adanya penyuluhan kegiatan hidroponik untuk membantuk perekonomian di desa.

Desa Pinggir, Desa Semunai, dan Desa Muara Basung, tak khayal telah melirik hidroponik sebagai salah satu potensi ekonomi kreatif. Hasil tanam yang ramah lingkungan, efisien lahan, dan memiliki peluang bisnis yang besar, menjadikan hidroponik menjadi pilihan tepat dalam membangun perekonomian Desa di Kecamatan Pinggir.

Penyuluhan oleh TPID Kecamatan Pinggir terhadap giat menanam tanaman hidroponik merupakan salah satu trik pengenalan hidroponik kepada masyarakat. Peran TPID, juga menjadikan hidroponik semakin dikenal di kalangan masyarakat desa. Hasil yang menjanjikan harusnya membuat tanaman hidroponik menjadi salah satu komoditas di desa-desa yang ada di Kecamatan Pinggir.

*“Sejatinya hidroponik dapat menjadi salah satu komoditas penunjang ekonomi desa. Dengan hadirnya BUMDes tentunya dapat memediasi masyarakat dengan perangkat desa dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif desa, khususnya desa-desa*

di Kecamatan Pinggir”. (Wawancara dengan Kepala Desa Semunai, 9 Januari 2021).

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa kepala desa mendukung adanya penyuluhan tanaman hidroponik untuk dijadikan sebuah inovasi.

## 2. Sumberdaya

Edward III Dalam Basofi (2010:98) mengatakan bahwa faktor sumber daya memiliki 3 sub indikator yaitu Sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.

Maksud Sumber daya dalam penelitian ini adalah Indikator sumberdaya merupakan kunci dari berjalannya implementasi kebijakan karena sumberdaya adalah faktor penggerak dalam menjalankan implementasi tersebut.

### a. Sumber Daya Manusia

Edward III dalam basofi (2010:98) menyatakan *“Probably the most essential resources in implementing policy is staff”*

Demikian juga dalam proses implementasi program inovasi desa di Kecamatan Pinggir yang melibatakn SDM sebagai pelaksana dalam proses implementasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir mengatakan bahwa:

*“Pelaksana utama PID adalah Tim Inovasi Kabupaten atau Kota (TIK) di tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di tingkatkecamatan. Para pelaksana PID ditempatkan disetiap tingkatan struktural pemerintahan mulai dari desa hingga pusat. Pelaksana tersebut tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis dalam mengawal pelaksanaan program sesuai PTO (Petunjuk Teknis Organisasi) dalam rangka*

*pencapaian target KPI yang telah ditetapkan”.*(Wawancara, 7 Januari 2021).

Dari tanggapan diatas dijelaskan bahwa Ibu suryati mengetahui siapa saja pelaksana dari program inovasi desa berdasarkan Pedoman Inovasi Desa sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kemendes TT Nomor 83 Tahun 2017.

Pelaksana Program Inovasi Desa di Kabupaten/Kota adalah (TIK) DAN Pelaksana dikecamatan sebagaimana disingkat dengan (TPID).

*“Pelaksana tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis dalam mengawal pelaksanaan program sesuai PTO dalam rangka pencapaian target KPI yang telah ditetapkan”.*  
*(Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa bapak Febrizal, ST memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan program inovasi desa.

Adapun Perincian pelaksan PID ditingkat Desa adalah Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping desa, Kader Pembangunan Manusia. Dan pelaksana Program Inovasi desa ditingkat Kecamatan adalah Camat, Tim Pelaksana Inovasi Desa.

Berikut tanggapan dari Kepala desa Semunai mengenai Pelaksana PID:

*“Pelaksana PID adalah orang-orang yang dari pusat sampai ke Desa, sampai saat ini, ya cuma sampai disosialisasi saja, belum dilaksanakan tertunda saja karena masih banyak kerjaan yang lain yang harus dikerjakan apalagi sekarang pemerintah lagi sibuk ngurus pandemi”* (wawancara 7 januari,2021).

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan PID hanya baru saja disosialisasikan tertunda kinerja karena pandemi covid-19.

b. Anggaran

Edward III dalam Basofi (2010:10) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation and cityzen apposition limit the acquisition of adequate facilitis. This is turn limit the quality of service that imlementor can be provide to public”*

Dalam penelitian ini lingkup sumberdaya, tidak hanya berbicara masalah SDM, namun juga terkait dengan anggaran atau dana yang disediakan dalam menjalankan program. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan. Anggaran menjadi bagian terpenting dansarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap organisasi.

Anggaran dari implementasi program inovasi desa berasal dari pemanfaatan dana desa. Program Inovasi Desa (PID) Meningkatkan kualitaspenggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunandan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan pekaterhadap kebutuhan masyarakat Desa, mendorong produktivitas danpertumbuhan ekonomi perdesaan dan membangun kapasitas Desayang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialekonomimasyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dankebijakan dan sasaran Kementerian Desa PD TT.

*“Pemerintah pusat memiliki keinginan untuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia. Hal itu juga merupakan langkah utama membangun bangsa. Pemerintah kemudian meluncurkan program dana desa yang selama hampir lima tahun ini dana yang telah terkucur sebanyak Rp 257 triliun telah dibagikan ke 74.957 desa di*

*seluruh Indonesia”. (Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi Ibu Suryati membaca berita yang ada di sosial media dengan mengatakan hal tersebut.

*“Penetapan alokasi dana tersebut didasarkan pada: 1) Jumlah Desa di tiap kecamatan 2) Tingkat kesulitan dengan dilandasi dari rata-rata jarak jauhnya desa dengan pusat kecamatan.” (Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir, 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian dana PID ini adalah dana dari APBN lewat provinsi dilaksanakan di kabupaten menggunakan dana transfer tapi sejak tahun 2020 tidak ada lagi kegiatan tersebut. Dilanjutkan dengan tanggapan Bapak Febrizal, ST :

*“Penggunaan dana desa untuk PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDPT yang kemudian dijabarkan melalui RKP Desa” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Selanjutnya tanggapan dari Kepala desa Muara Basung mengenai Anggaran PID :

*“Setau saya anggaran PID ini ditetapkan oleh pusat, tapi karna penyuluhan nya tidak jelas. Ya desa berinovasi sesuai dengan kemampuan desa sendiri. Berinovasi tetap tapi tidak menggunakan PID yang ditetapkan, karena PID hanya baru disosialisasikan saja” (Wawancara dengan Bapak Akyar Mukmin selaku Kepala desa Muara Basung 7 Januari,2021).*

Dari tanggapan diatas dijelaskan bahwa anggaran dari PID tersebut belum ada, Desa tersebut berinovasi sesuai dengan dana desa. Selanjutnya tanggapan dari bapak Umar B selaku Kepala desa Semunai:



*“Bicara masalah anggaran, kami tetap pakai anggaran desa sendiri untuk berinovasi, kalau dana dari PID belum ada, kami juga tidak pakai PID belum ada soal itu diterapkan, masih dengan aturan yang lama untuk berinovasi sesuai desa sumber daya alam desa” (wawancara dengan Bapak Umar B selaku Kepala desa Semunai 7 Januari, 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang digunakan adalah dana desa untuk berinovasi.

c. Fasilitas

Edward III dalam Basofi (2010:102) mengatakan bahwa sumber daya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Maksud Fasilitas dalam penelitian ini adalah sarana dalam mendukung program inovasi desa yang dilaksanakan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pinggir.

*“Salah satu fasilitas yang disediakan dalam program inovasi desa adalah fasilitas bak sampah. Kenapa bak sampah? Karena pengelolaan sampah merupakan salah satu bagian dari program inovasi desa yang dijalankan di Kecamatan Pinggir.” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Berdasarkan observasi dalam penelitian di kecamatan pinggir belum merata bak sampah, namun bak sampah ini juga bukan merupakan salah satu fasilitas dari Program inovasi desa tetapi program kebersihan yang ada dipemerintah. Selanjutnya tanggapan dari kepala desa muara basung:

*“Fasilitas inovasi desa di desa kami bukan fasilitas dari PID, tetapi memang dari fasilitas inovasi desa kami sendiri, seperti bak sampah,*

*kemudia bibit tanaman olahan makanan mengalo'' (wawancara dengan Akyar Mukmin 7 Januari, 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai fasilitas tetapi bukan dalam program inovasi desa 83 tahun 2017. Dilanjutkan dengan tanggapan kepala desa semunai:

*“sebenarnya program fasilitas inovasi desa itu sudah ada dibagian posyantekdes tapi PID tidak bersinergi dengan itu, PID pun tidak bisa dijalankan dengan maksimal”(wawan ara dengan bapak Umar B 7 Januari 2021).*

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa program PID tidak bersinergi dalam fasilitas, dan PID sendiri pun belum berjalan..

### **3. Disposisi**

Pengertian Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Maksud disposisi dalam penelitian ini adalah sikap pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan sangat mempengaruhi. Dalam indikator ini peneliti menentukan 3 sub indikator, yaitu pemahaman, pengetahuan, dan sikap.

#### **a. Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses atau cara memahami sesuatu dan mempelajari baik-naik supaya paham dan pengetahuan banyak. Em zul dalam Sandika (2008:5).

Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah bagaimana setiap Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir mampu memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik.

*“Dalam prosesnya yang telah berjalan selama ini setiap tim yang tergabung dalam Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir mampu memahami dengan baik setiap rincian tugas yang telah ditetapkan pada masing-masing bagiannya.” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian pelaksana PID belum paham mengenai program sebab Tim hanya baru saja dibentuk dan belum dilaksananya program tersebut. Dilanjutkan dengan tanggapan Kepala desa Semunai :

*“Ya bagaimana mau paham, sosialisasinya masih belum jelas mungkin dari pihak dari kabupaten terkendala dengan covid-19 jadi segala kegiatan tertunda”(wawancara dengan bapak Adra 7 Januari 2021).*

Berdasarkan tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemahaman dari PID belum terpahami karena keterbatasan sosialisasi.

#### b. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya. Notoatmodjo,2010:14)

Maksud pengetahuan dalam penelitian ini adalah Indikator yang berikutnya dari disposisi, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman setiap tim pelaksana, baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan.

*“Untuk menambah pengetahuan dari Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir, ada diadakan beberapa kali pelatihan terutama pada saat pertama kali tim ini dibentuk.” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Berdasarkan tanggapan diatas menurut observasi penelitian terhadap beberapa kepala desa pelatihan belum diadakan karena langsung terjun dalam pembentukan TIM pada saat itu. Selanjutnya tanggapan dari Kepala desa Pinggir :

*“ Pemahaman untuk PID ini sendiri yang kita tau berinovasi, tapi kan sudah ada pedoman nya, kita tetap berinovasi sesuai kemampuan desa, tetapi untuk PID sendiri belum kita terapkan” (wawancara dengan bapak Adra selaku Kepala desa Pinggir 7 Januari,2021)*

Dari tanggapan diatas dijelaskan bahwa bapak adra mengetahui pemahan dari PID tetapi desa berinovasi tidak menggunakan PID.

#### c. Sikap

Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaanya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Damiami, dkk dalam Sandika (2019:36).

Maksud sikap dalam penelitian ini indikator yang terakhir dari disposisi adalah Sikap. Sikap merupakan kecenderungan perilaku atau tindakan yang ditunjukkan atau diekspresikan oleh setiap anggota petugas dalam menjalankan amanat pengimplementasian program inovasi desa.

*“Sikap yang ditunjukkan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir cukup baik, hal ini terlihat dari rapat-rapat yang diadakan beberapa kali, tim cukup antusias dalam*

*memberikan masukan dan saran serta kekurangan dari pelaksanaan tugas selama ini di lapangan .” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi adalah sebuah pencitraan karena belum dilaksanakannya rapat mengenai masukan dalam menjalankan inovasi desa. Selanjutnya tanggapan dari masyarakat desa Semunai,

*“Setau kami belum pernah adanya tim turun ke desa-desa dalam menjalankan program” (Wawancara dengan Bapak Yudi selaku Masyarakat Desa semunai 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas bapak yudi mengatakan belum pernah adanya tim yang datang kedesa untuk melakukan inovasi.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi ini menurut Edward Gerge III dalam Sandika (2010:106) mengatakan bahwa mencakup aspek seperti sturuktur birokrasi , pembagian kewenangan , hubungan antara unit-unit organisasi dengan yang lainnya.

Struktur Birokrasi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dengan indikator struktur birokrasi peneliti menggunakan sub indikator tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam proses implementasi sebuah program terutama terkait program pemerintah. Tugas dan tanggung jawab disini mengacu pada tugas dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir.

##### **a. Tugas**

Definisi tugas menurut Dale yoder dalam Moekijat (1998:10) tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.

Maksud tugas dalam penelitian ini adalah salah satu sub indikator Stuktur Organisasi yang dilakukan untuk mengetahui implementasi program inovasi desa yang berada di kecamatan pinggir.

*“Setiap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut program inovasi desa dilaksanakan sesuai dengan sesuai PTO (Petunjuk Teknis Organisasi.” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*

Dari tanggapan diatas berdasarkan observasi penelitian Tugas yang dijalankan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa belum dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Tekns Organisasi. Kemudian dilanjutkan dari tanggapan Kepala desa Muara Basung,

*“ Pelaksanaan Tugas Program inovasi desa ini , sudah diinformasi dari kecamatan, tetapi masih belum dilaksanakan tugas-tugas nya, mengapa demikian ya karna anggaran tidak masuk dikarenakan Covid-19, tetapi kami tetap melakukan inovasi untuk desa tetapi tidak melalui program inovasi desa (PID) yang ada di 83 tahun 2017.” (Wawancara dengan Akyhar Mukmin Selaku Kepala Desa Muara Basung)*

Dari tanggapan diatas berdasarkan Observasi penelitian, Desa Muara Basung mempunya inovasi seperti pemanfaatan perkebunan Pucuk Ubi untuk diolah jadi makanan khas suku melayu yang disebut Mengalo.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatannya. Hans Kelsen dalam Sandika (2007:15).

Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah sub indikator dari struktur Birokrasi yang menilai dari tanggung jawab kinerja Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir.

*“mengenai permasalahan pertanggung jawaban ya itu sudah pasti, dalam setiap pelaksanaan ada pertanggung jawabannya, sesuai dengan pedoman inovasi desa kemendes 83 tahun 2017”*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan Pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan tetapi berdasarkan observasi, kegiatan pelaksanaan program inovasi yang ada di pedoman nomor 83 tahun 2017 tentang Pedoman Inovasi desa belum terlaksana. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari Bapak Adra selaku Kepala Desa Pinggir ,

*“Berbicara soal tanggung jawab, kami selalu bertanggung jawab mengenai hal apa saja menyangkut dengan inovasi yang dibuat oleh pemberdayaan masyarakat desa di desa, tetapi kalau tanggung jawab tentang PID, Yaaa mau bicara soal apa nyatanya itu belum dilaksanakan mungkin karena anggaran terhambat covid-19” (wawancara 7 januari 2021).*

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa bapak Adra akan bertanggung jawab atas kebijakan yang ada, akan tetapi tanggung jawab atas pelaksanaan PID tidak ada pertanggung jawaban karena belum dilaksanakan Program Inovasi Desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan Implementasi Program Inovasi Desa Kecamatan Pinggir yang berpedoman Kemendes PDTT Nomor 83 Tahun 2017 Belum terlaksana. Hal ini karena Program inovasi desa ini baru meluncur di Era pemerintahan Kecamatan Pinggir, dan baru saja disosialisasikan dan dibentuknya Tim untuk pelaksanaan Program Inovasi Desa tetapi belum di terapkan atau dijalankan.

## **B. Kendala dalam Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)**

Dalam melaksanakan program tentu adanya hambatan-hambatan yang menjadi suatu kegiatan tidak dapat terlaksana. Begitu juga halnya dengan Program Inovasi Desa, adapun faktor atau kendala implementasi Program Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

### **1. Waktu Sosialisasi yang Singkat**

Evaluasi pada tahun 2018 Pelaksana Program Inovasi Desa kecamatan Pinggir mengatakan terkendala masalah utama pada legalitas, karena waktu sosialisasi relatif tidak cukup waktu ataupun waktu yang mepet, pada akhirnya pelaksanaan inovasi desa tahun 2018 belum bisa terlaksana .

*“Permasalahan awalnya muncul di tahun 2018, dimana karena waktu sosialisasinya relatif singkat jadi pengurusan legalitasnya belum dapat disipakan segera, namun di tahun berikutnya problem tersebut dapat diatasi dengan baik.” (Wawancara dengan Febrizal, ST selaku Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), 7 Januari 2021).*



Faktor penghambat ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh

Kepala Desa Pinggir yang menyatakan bahwa:

*“faktor penghambatnya program inovasi desa ini salah satunya proses sosialisasi informasi dan inovasi PID sangatsingkat dek, jadi dari pemerintah desa kurang persiapan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di desa”.*(Wawancara, 7 Januari 2021).

## 2. **Rumitnya Pelaporan Dan Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Desa**

Pada saat wawancara informan juga mengatakan faktor penghambat program inovasi desa dalam penerapannya sebagaimana berikut tanggapannya:

*“Rumitnya pelaporan dan teknis pelaksanaan program inovasi desa ini membuat pemerintah desa lebih memilih bekerja sama dengan pihak swasta dibanding dengan pihak pemerintah sendiri, misalnya dalam kegiatan memajukan produk unggulan desa, jika kita berkerja sama dengan pihak swasta pelaporan hanya sebatas bukti pelaksanaan kegiatan, namun jika melalui kerja sama dengan pemerintah, kita harus melakukan pelaporan secara terperinci dan detail”.* (Wawancara, 7 Januari 2021).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai “Implementasi Program Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Pinggir)” adalah:

1. Pada aspek sosialisasi menunjukkan bahwa sosialisasi program inovasi desa, dilaksanakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dibuka oleh H. Drs Sutrisno selaku Sekretaris Kecamatan Pinggir.
2. Pada aspek sumberdaya menunjukkan bahwa pelaksana utama PID adalah Tim Inovasi Kabupaten atau Kota (TIK) di tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di tingkat kecamatan, dan juga di tingkat desa.
3. Pada aspek disposisi menunjukkan bahwa dalam prosesnya yang telah berjalan selama ini setiap tim yang tergabung dalam Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pinggir mampu memahami dengan baik setiap rincian tugas yang telah ditetapkan pada masing-masing bagiannya.
4. Pada aspek struktur organisasi menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut program inovasi desa dilaksanakan sesuai dengan sesuai PTO (Petunjuk Teknis Organisasi).
5. Kendala yang ditemui dalam tahapan implementasi program inovasi desa di Kecamatan Pinggir adalah:

- a. Waktu Sosialisasi yang Singkat
- b. Rumitnya Pelaporan Dan Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Desa

## **B. Saran**

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, saran yang disampaikan peneliti kepada pemerintahannya antara lain:

1. Kepada pemerintahan kecamatan Pinggir hendak diharapkan lebih memperhatikan program yang akan dilaksanakan dengan memaksimalkan peran.
2. Terhadap Pemerintahan desa hendaknya lebih diperhatikan potensi yang ada didesa dan melestarikan SDA yang ada sesuai kemampuan desa tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik* . Bandung. CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa : (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bevir, Wasistiono, dan Simangunsong. 2011. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.
- Budiarjo, M. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Poltik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied, 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, Wiliam N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Rrefika Aditama.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaho, Josep Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah (Di Negara Republik Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, dan Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Koryati, Nyimas Dwi. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan* . Yogyakarta. Erlangga.
- Lubis,Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung. Mandar Maju.

Miftah, Thiha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Mardikanto & Soebinto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ndraha, Talidzu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta. Rineka Cipta.

Ndraha, Talidzu. 1982. *Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan*. Pekanbaru: Alaf Riau-Graha UNRI Press

Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumaryani, 2005. *Anaisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alafbeta.

Soejito, Irawan. 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama.

**Dokumentasi:**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Inovasi Desa.

**Rujuan Internet:**

<https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%202%20-%2008417141005.pdf>. Diakses pada tanggal 11 desember 2020 pukul 12.20 WIB.

<https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=IMPLEMENTASI+PROGRAM+INOVASI+DESA>. Diakses pada 20 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau